



**“Jatim Bangkit 2021”**

# **PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI**

**WIWIT KURNIAWATI  
KEPALA SUB BAGIAN AKUNTABILITAS KINERJA  
BIRO ORGANISASI**

# SASARAN REFORMASI BIROKRASI



Pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah

pemerintahan belum efektif dan efisien

Pelayanan publik masih buruk

## 8 Area Perubahan



pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi

pemerintahan yang efektif dan efisien

pelayanan publik yang baik dan berkualitas

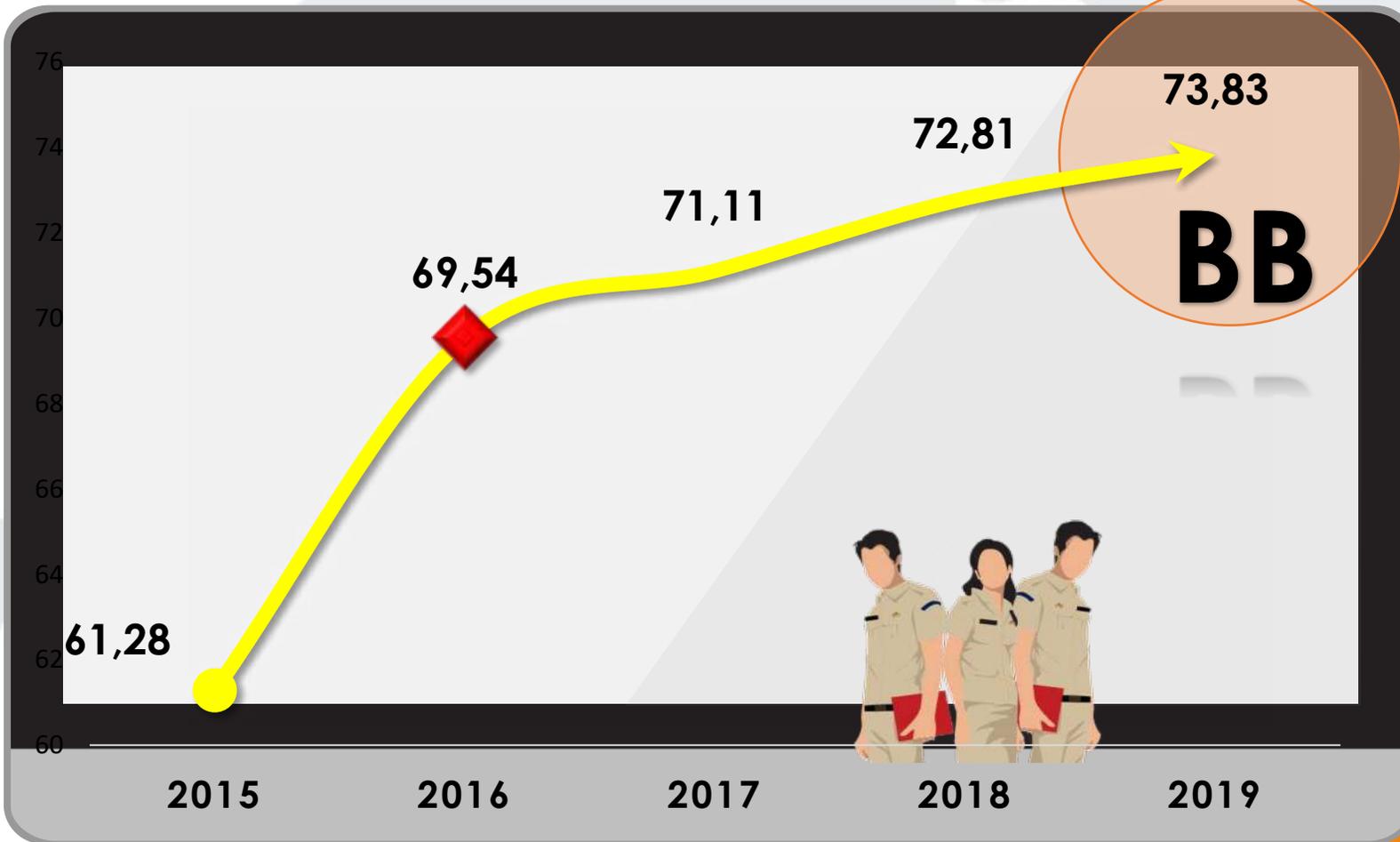
# AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menggunakan **8 (delapan) Area Perubahan**





# INDEKS REFORMASI BIROKRASI **JAWA TIMUR**



Sejak Tahun 2017,  
**Indeks Reformasi  
Birokrasi** telah  
ditetapkan sebagai  
**Indikator Kinerja  
Utama (IKU)** RPJMD  
Provinsi Jawa Timur

# INDEKS RB KAB./ KOTA DI JAWA TIMUR

No	Kabupaten/ Kota	Nilai	Predikat	No	Kabupaten/ Kota	Nilai	Predikat	No	Kabupaten/ Kota	Nilai	Predikat
1.	Kota Surabaya	77,00	BB	16.	Kab. Pacitan	64,30	B	31	Kota Kediri	56,95	CC
2.	Kab. Banyuwangi	76,13	BB	17.	Kab. Ponorogo	64,17	B	32	Kab. Bojonegoro	56,59	CC
3.	Kota Malang	69,67	B	18.	Kab. Mojokerto	63,86	B	33	Kab. Magetan	56,31	CC
4.	Kab. Malang	67,36	B	19.	Kab. Situbondo	63,00	B	34	Kab. Sampang	56,00	CC
5.	Kota Madiun	67,34	B	20.	Kab. Pasuruan	62,75	B	35	Kab. Jember	56,00	CC
6.	Kota Probolinggo	66,81	B	21	Kota Mojokerto	62,31	B	36	Kab. Lumajang	55,96	CC
7.	Kab. Trenggalek	66,77	B	22	Kota Pasuruan	61,62	B	37	Kab. Jombang	55,89	CC
8.	Kab. Probolinggo	66,75	B	23	Kota Batu	60,96	B	38	Kab. Bangkalan	54,38	CC
9.	Kab. Gresik	66,69	B	24	Kab. Sumenep	60,83	B				
10.	Kota Blitar	66,16	B	25	Kab. Kediri	60,47	B				
11.	Kab. Ngawi	66,06	B	26	Kab. Nganjuk	60,29	B				
12.	Kab. Sidoarjo	65,77	B	27	Kab. Pamekasan	60,06	B				
13.	Kab. Lamongan	65,02	B	28	Kab. Tuban	60,02	B				
14.	Kab. Tulungagung	65,00	B	29	Kab. Madiun	60,01	B				
15.	Kab. Bondowoso	64,74	B	30	Kab. Blitar	58,00	CC				

# HASIL EVALUASI SAKIP KAB./ KOTA DI JAWA TIMUR

No	Kabupaten/ Kota	Nilai	Predikat	No	Kabupaten/ Kota	Nilai	Predikat	No	Kabupaten/ Kota	Nilai	Predikat
1.	Kab. Banyuwangi	83,1	A	16.	Kab. Bondowoso	71,3	BB	31	Kab. Kediri	66,44	B
2.	Kab. Situbondo	81,5	A	17.	Kab. Madiun	71	BB	32	Kab. Lumajang	65,74	B
3.	Kab. Gresik	80,69	A	18.	Kota Probolinggo	71	BB	33	Kab. Sampang	64,99	B
4.	Kab. Ngawi	80,56	A	19.	Kab. Ponorogo	70,97	BB	34	Kab. Bojonegoro	64,46	B
5.	Kab. Lamongan	80,12	A	20.	Kota Kediri	70,75	BB	35	Kab. Nganjuk	63,56	B
6.	Kab. Sidoarjo	77,26	BB	21.	Kab. Jombang	70,47	BB	36	Kota Batu	63	B
7.	Kab. Tulungagung	75,83	BB	22.	Kab. Tuban	69,00	B	37	Kab. Bangkalan	61,25	B
8.	Kab. Pasuruan	75,02	BB	23.	Kab. Magetan	68,94	B	38	Kab. Jember	60,75	B
9.	Kota Malang	75	BB	24.	Kab. Pamekasan	68,8	B				
10.	Kab. Mojokerto	74,98	BB	25.	Kab. Pacitan	68,59	B				
11.	Kota Surabaya	73,47	BB	26.	Kab. Sumenep	68,5	B				
12.	Kab. Malang	72,48	BB	27.	Kota Pasuruan	68,5	B				
13.	Kota Blitar	71,91	BB	28.	Kab. Blitar	68,47	B				
14.	Kab. Probolinggo	71,5	BB	29.	Kota Madiun	68,2	B				
15.	Kab. Trenggalek	71,39	BB	30.	Kota Mojokerto	66,5	B				

# BEBERAPA CATATAN PELAKSANAAN RB

1

RB BERSIFAT PROYEK



3



TIDAK TERINTEGRASI

2

TIDAK MENGACU PADA AKAR PERMASALAHAN



4

FUNGSI PENGAWASAN TIDAK OPTIMAL



# PROSES BISNIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI



# STRATEGI IMPLEMENTASI

## Akuntabilitas Kinerja sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi





# Manajemen Perubahan



## WHAT'S NEW

### Pemenuhan

- Road Map harus terdiri dari 8 area perubahan (**terintegrasi** atau tidak terintegrasi)

### Reform

#### ■ Komitmen dalam Perubahan

- perubahan konkret dari Agen Perubahan
- Perubahan yang dibuat Agen Perubahan terintegrasi dalam sistem Manajemen
- unit kerja didorong untuk melakukan perubahan

#### ■ Komitmen Pimpinan

- adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan instansinya
- perhatian khusus kepada unit kerja yang berhasil melaksanakan reformasi

#### ■ Membangun Budaya Kerja

- Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

# Deregulasi Kebijakan

Menurunkan tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundangan, meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundangan, dan Kemudahan berusaha



“Kita butuh deregulasi besar-besaran, penyederhanaan dan konsistensi di dalam membuat regulasi, yang orientasinya terhadap hasil, *output*. Jangan sampai kita ini masih seperti dulu-dulu.”



## WHAT'S NEW

### Reform

#### Peran Kebijakan

- Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya
- Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi

#### Penyelesaian Kebijakan

- Penyelesaian kebijakan sesuai dengan Program Legislasi K/L/Pemda

# Penataan dan Penguatan Organisasi

Mewujudkan Efektivitas dan Meningkatkan efisiensi Organisasi K/L/P secara Profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Tusi, sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, sederhana, dan lincah



## Pemenuhan

- **Penataan Organisasi**
  - desain organisasi yang sesuai dengan rencana strategis
  - Penyederhanaan tingkat struktur organisasi
  - mekanisme hubungan dan koordinasi JPT dengan Jabatan Fungsional
  - Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional
  - disusun kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi
- **Evaluasi Kelembagaan**
  - Evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit organisasi di atasnya
  - Evaluasi yang menganalisa rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya

## Reform

- **Organisasi Berbasis Kinerja**
  - Penyesuaian organisasi sesuai proses bisnis dengan mempertimbangkan kinerja utama
- **Penyelesaian Organisasi**
  - Peta Proses Bisnis yang ideal dalam rangka penyederhanaan Organisasi
- **Hasil Evaluasi Kelembagaan (Permenpan 20 Tahun 2018)**



## WHAT'S NEW

# PENATAAN TATALAKSANA

meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada masing-masing K/L/P

### Pemenuhan

- **Perubahan subkomponen e-government menjadi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**
  - Arsitektur SPBE
  - Peta Rencana SPBE
  - Tim Koordinasi
  - Penerapan Manajemen SPBE
- **Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap**
  - peta proses bisnis sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
  - Peta Proses Bisnis Sesuai dengan Renstra dan Rencana Kerja
  - Penjabaran Peta Lintas Fungsi
  - Evaluasi sesuai dengan efektivitas hubungan antar unit kerja
- **Kualitas Pengelolaan Arsip menjadi Komponen "Hasil Antara"**

### Reform

- **Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan**
  - Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan
- **SPBE yang Terintegrasi**
  - SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan **elayanan publik** yang lebih cepat dan efisien
  - SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan **elayanan internal organisasi** yang lebih cepat dan efisien
  - Predikat Indeks SPBE
- **Transformasi Digital yang Bermanfaat bagi Organisasi**
  - Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama
  - Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan
  - Transformasi digital pada bidang pelayanan publik

# PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

mendorong setiap ASN agar memiliki keterampilan dan kompetensi spesifik yang dapat membantu birokrasi menghadapi era digital dan industri 4.0.



## WHAT'S NEW

### Pemenuhan

- Pemilihan periode **monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu** menjadi lebih spesifik (**per Bulan/Triwulan/Semester/Tahun/Tidak**)
- Hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pemberian **reward and punishment** dari yang sebelumnya dijadikan dasar pengembangan karir

# PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

mendorong setiap ASN agar memiliki keterampilan dan kompetensi spesifik yang dapat membantu birokrasi menghadapi era digital dan industri 4.0.

## Reform

### Kinerja Individu

- Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (*outcome*) sesuai pada levelnya
- Pencapaian kinerja individu menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja/penghasilan

### Evaluasi Jabatan

- Hasil evaluasi jabatan pimpinan tinggi sudah disampaikan ke menteri/pejabat berwenang

### Assessment Pegawai

- Hasil assessment telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir

### Pelanggaran Disiplin Pegawai

- Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai

### Kebutuhan Pegawai

- Formasi dan penerimaan pegawai baru didasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan pegawai

### Penyetaraan Jabatan

- Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional dalam rangka penyederhanaan Birokrasi

### Manajemen Talenta

- Pemetaan talenta untuk penempatan jabatan kritikal dan rencana sukses jabatan
- Penerapan manajemen talenta dalam pengisian Jabatan Tinggi (**diperoleh dari persentase jabatan tinggi yang diisi dari proses manajemen talenta**)



# PENGUATAN AKUNTABILITAS

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk menciptakan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang akuntabel dan berkinerja tinggi.



## WHAT'S NEW

### Pemenuhan

1

#### Penambahan indikator atas subkomponen Keterlibatan Pimpinan

- Pemahaman Pimpinan atas Kinerja yang Harus Dicapai Dalam Jangka Menengah
- Pemahaman Pimpinan atas Kinerja yang Diperjanjikan Setiap Tahun

2

#### Pengurangan indikator untuk subkomponen Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

- Sistem Pengukuran Kinerja Telah Dirancang Berbasis Elektronik **(DIHAPUS)**

### Reform

1

#### Efektivitas dan Efisiensi Anggaran

Meliputi perhitungan jumlah program/kegiatan yang mendukung kinerja organisasi, jumlah sasaran kinerja yang tercapai dan anggaran yang berhasil di-*refocussing*

2

#### Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja

3

#### Pemberian *Reward and Punishment*

4

#### Kerangka Logis Kinerja

# PENGUATAN PENGAWASAN

Terciptanya pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis



## WHAT'S NEW

### Reform

i

#### Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

- Persentase penyampaian LHKPN

ii

#### Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

- Persentase penyampaian LHKASN

iii

#### Mekanisme Pengendalian Aktivitas Utama (SPIP)

- Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang

iv

#### Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat

v

#### Pembangunan Zona Integritas (ZI)

- Komitmen Pembangunan ZI (Akumulatif)
- Pemetaan Unit Kerja untuk membangun ZI
- WBK dalam 1 tahun
- WBBM dalam 1 tahun

vi

#### Peran APIP

- APIP telah menjalankan fungsi konsultatif
- APIP memberikan saran masukan terkait peningkatan kinerja unit kerja

# PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat



## WHAT'S NEW

### Pemenuhan

- **Pengurangan indikator pada subkomponen standar pelayanan (Level Unit Kerja)**
  - Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan **(Dihapus)**
  - Dilakukan Reviu dan Perbaikan atas SOP **(Dihapus)**
- **Penambahan indikator pada subkomponen budaya pelayanan prima**
  - Telah Terdapat Pemberian Kompensasi Atas Pelayanan Yang tidak Sesuai dengan Standar
- **Pengurangan indikator pada subkomponen pemanfaatan teknologi informasi**
  - Memiliki Rencana Penerapan Teknologi Informasi pada Pemberian Layanan **(Dihapus)**

### Reform

- **Inovasi yang Mendorong Perbaikan Pelayanan Publik**
- **Inovasi pada Perijinan dan Pelayanan telah Dipermudah**
- **Penanganan Pengaduan Pelayanan**



### Lanjutan



# PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

↓ Lanjutan

Reform

## INOVASI PELAYANAN PUBLIK

### Inovasi yang Mendorong Perbaikan Pelayanan Publik

upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah)

### Inovasi pada Perijinan dan Pelayanan telah Dipermudah

Persentase perijinan/pelayanan yang telah dipermudah

### Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi

### Penanganan Pengaduan Pelayanan

Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab

# LANGKAH IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI

KOMITMEN PIMPINAN

MELIBATKAN SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN

MEMBENTUK TIM REFORMASI BIROKRASI

MENETAPKAN ROAD MAP (8 AREA PERUBAHAN)

MENERAPKAN MANAJEMEN BERBASIS KINERJA

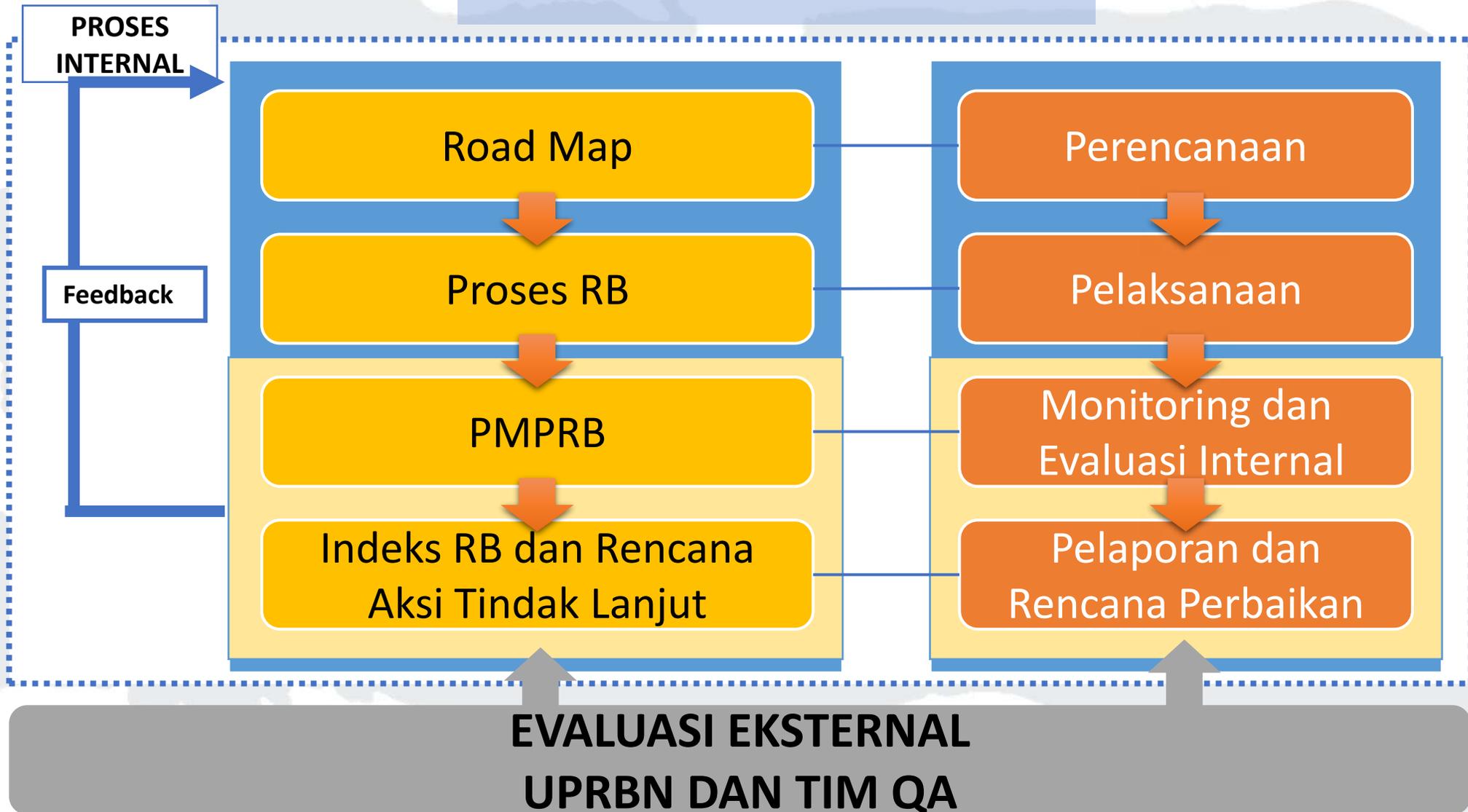
MELAKSANAKAN MONITORING DAN EVALUASI (PMPRB)

MENINDAKLANJUTI HASIL MONITORING DAN EVALUASI



# EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

# PROSES BISNIS EVALUASI



# MEKANISME EVALUASI

## KEMENTERIAN / LEMBAGA / PEMDA

Memperoleh akun dan password

Membentuk Tim Evaluator Internal

Panel evaluasi pelaksanaan RB

APIP mengirimkan hasil ke sekjen/sekda/sesma

Sekda mengirimkan ke Menpanrb

## KEMENTERIAN PANRB

Hasil Evaluasi Eksternal

Panel Evaluator

Verifikasi Lapangan

Desk Evaluation

PROFIL REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

# PRINSIP PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

## ► Perbaikan berkelanjutan

Hasil penilaian digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi secara terus menerus, melalui siklus rencanakan, laksanakan, monitoring dan evaluasi serta lakukan perbaikan

## ► Kejujuran dalam penilaian

Untuk memotret/menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara akurat sesuai dengan kondisi yang senyatanya dalam praktik, diperlukan kejujuran dalam melakukan penilaian. Rekayasa/ketidakjujuran justru tidak akan dapat memberikan informasi mengenai perbaikan-perbaikan berkelanjutan yang harus dilakukan.

## ► Terdokumentasikan

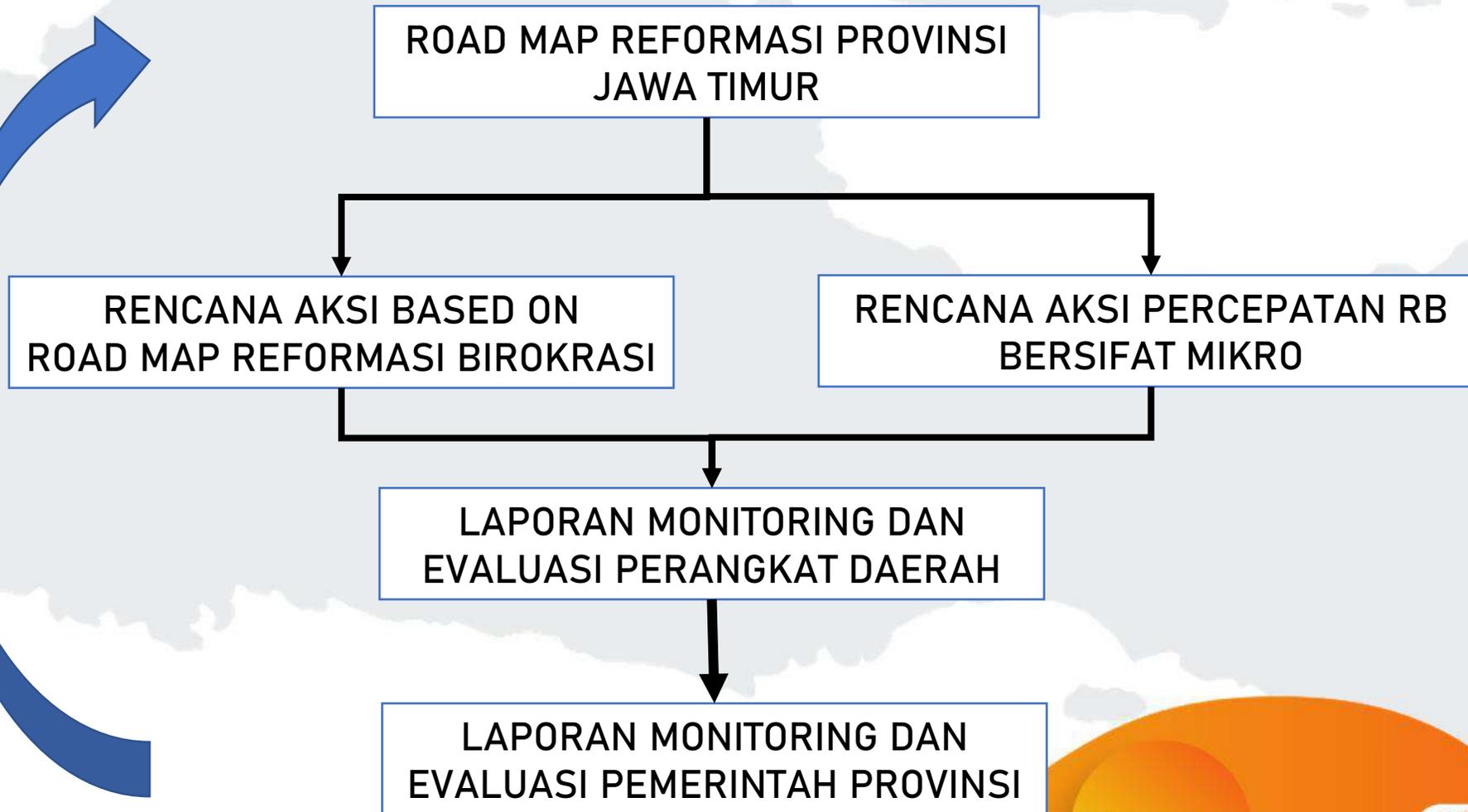
Seluruh proses pelaksanaan reformasi birokrasi harus didokumentasikan dengan baik sesuai dengan siklus rencanakan, laksanakan, monitoring dan evaluasi serta lakukan perbaikan.



# PERAN PERANGKAT DAERAH

# PERANGKAT DAERAH PADA REFORMASI BIROKRASI

f  
e  
e  
d  
b  
a  
e  
k



# SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR

## BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
- C. SISTEMATIKA

## BAB II RENCANA KERJA

- A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
- B. RENCANA KERJA (Jangka Menengah Dan Tahun Berjalan)

## BAB III PELAKSANAAN RB

- A. REALISASI DAN CAPAIAN
- B. ANALISIS, EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

## BAB IV PENUTUP

- A. SIMPULAN
- B. REKOMENDASI



Terima Kasih